

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aspek pengawasan pemerintah secara obyektif dapat dilihat bahwa pembangunan dibidang industri mempunyai kelebihan dan kelemahan. Di satu sisi keberadaan industri bila dilihat dari segi positifnya, yaitu memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi daerah. Sistem ekonomi menuntut daerah untuk mandiri dalam bidang ekonomi, karena seluruh pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Pengawasan sangat diperlukan karena sering kali terjadi suatu penyimpangan dalam proses industri yang dilakukan usaha-usaha industri. Penyimpangan yang sering terjadi adalah adanya pelanggaran yang diberkaitan dengan kelestarian lingkungan, seperti sistem pengolahan limbah produksi yang tidak sempurna. Hal ini berarti usaha tersebut tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Pelanggaran mengenai lingkungan hidup diawali dari proses pendirian pabrik yang terkadang tidak mengindahkan aturan mengenai Tata Guna Tanah. Pabrik didirikan diatas tanah yang mempunyai tingkat kemanfaatan yang tinggi, sehingga tanah tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tingkat kemanfaatannya.

Seharusnya pabrik-pabrik itu didirikan diatas tanah yang memiliki tingkat kemanfaatan rendah, yaitu tanah yang tidak produktif. Setelah pabrik itu berdiri, dalam menjalankan proses sering kali terjadi kesalahan-kesalahan yang berakibatkan